



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2025, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya.

Kuala Tungkal, Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19680817 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABELiv

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat..... 6

2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah.....17

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah18

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI SETDA

3.1 Indikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan setda20

3.2 Teladan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....23

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.....40

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis45

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat46

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda.....50

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN51

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....70

BAB. VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....82

BAB. VIII. PENUTUP..... 86

DAFTAR TABEL

Tabel I. T.C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.....	17
Tabel II. T.C 24 Review Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat 2016 – 2026	17
Tabel III. Matrix Penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat	26
Tabel IV. Matrix Penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat	28
Tabel V. Komparasi sasaran Renstra Setda Kab. Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra Setda Provinsi Jambi dan Renstra dan Renstra Kementrian Dalam Negeri	42
Tabel VI. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten.....	50
Tabel VII. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026	50
Tabel VIII. Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan	52
Tabel IX. <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Sekretariat Daerah terhadap Indikator Renstra	70
Tabel X. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	70
Tabel XI. Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan.....	76
Tabel XII. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	76

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005–2025. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabiupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 8 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan Nomenklatur SKPD Penanggungjawab RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021 pada Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Tanjung jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 33).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian - Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
	Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI SETDA
	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VI PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDATAAN

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekeretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan fungsi koordinasi perumusan kebijakan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c) Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, keuangan, asset, hubungan masyarakat dan protokol;
- d) Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- e) Pelaksanaan penanganan urusan kerjasama dan perbatasan;
- f) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana sekretariat daerah;
- g) Pelaksanaan pelayanan asistensi / konsultasi lingkup tugas; dan
- h) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah :

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelaanan administratif.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (3), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c) Pemantauan dan evaliasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d) Pelayanan adaministratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerjasama;
- b) pengoordinasi penyusunan kebijakan Daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama;
- d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum dan kerjasama;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. Bagian Tata Pemerintahan;

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian rumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang administrasi pemerintahan kewilayahan dan otonomi daerah;
 - d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian kebijakan dibidang keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bagian Hukum

1. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang produk hukum daerah, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bagian Kerja Sama

1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang fasilitas kerjasama dalam negeri, fasilitas kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerjasama.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang fasilitas kerjasama dalam negeri, fasilitas kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerjasama;

- b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pasilitas kerjasama dalam negeri, pasilitas kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evalusai kerjasama;
- c) Penyaiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pasilitas kerjasama dalam negeri, pasilitas kerjasama luara negeri, serta monitoring dan evaluasi kerjasama;
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebuajkan daerah dibidang pasilitas kerjasama dalam negeri, pasilitas kerjasama luar negeri serta monitoring evaluasi kerjasama;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang kerjasama; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (43), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a) Penggordinasian pengususnan kebijakan daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
 - b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas erangkat daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam;
 - c) Penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang/jasa;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang/jasa;
 - e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkaiat pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor ang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
 - f) Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. Bagian Sumber Daya Alam

1. Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakna daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutan, kelautan dan perikan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bagian Perekonomian

1. Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian mempunyai fungsi
 - a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan

evaluasi dan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dibidang penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan;
 - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi lingkup evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Asisten Administrasi Umum :

1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (78), Asisten

Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a) penyusunan kebijakan daerah dibidang organisasi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan , serta perencanaan dan keuangan ;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f) penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

A. Bagian Organisasi

1. Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bagian Umum

1. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usahapimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga;

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan; dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Staf Ahli

1. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
2. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
3. Staf Ahli, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten.

Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi bagian, sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan.
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum,
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - 4) Bagian Kerja Sama, mencakup :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri,
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri,
 - c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah di bidang

perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program.
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Sumber Daya Alam, mencakup :
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
 - 3) Bagian Perekonomian, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 - 4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi dan umum yang membawahi :

- 1) Bagian Organisasi, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Bagian Umum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Protokol.
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Perencanaan.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Pelaporan.

3. Staf Ahli

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pegawai sebanyak 271 orang, yang terdiri dari 140 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 239 Orang Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Harian Lepas (TKS, TKK, THL),

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 7 pegawai, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta 3 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing - masing sebanyak 36 yaitu para kepala bagian orang dan 12 orang, kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat PNS, TKS, TKK dan THL yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 94 orang, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 6 orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 168 orang, yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 5 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021- 2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel **T.C. 23** dan **T.C. 24** berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat

Daerah

Lingkungan strategis yang berpengaruh terdiri dari Analisis lingkungan Internal (ALI) terhadap aspek kekuatan (*Strength*) dan aspek kelemahan (*Weakness*) dan analisis lingkungan Eksternal (ALE) terhadap aspek Peluang (*Opportunity*) dan aspek hambatan/ancaman (*Threat*).

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang dari sudut Analisis SWOT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi / satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara rinci faktor internal terdiri dari :

1) Kekuatan (*Strength*) ;

- a. Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tupoksi;
- b. Tersedianya sumber daya Manusia dalam jumlah yang cukup;
- c. Adanya kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup;
- e. Kemampuan dan kemauan aparatur jajaran Sekretariat Daerah yang cukup tinggi untuk belajar.

2) Kelemahan (*Weakness*) ;

- a. Motivasi kerja aparatur masih belum merata;
- b. Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik;
- c. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang dan belum merata;
- d. Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas;
- e. Kurangnya koordinasi dalam mendukung mekanisme teamwork.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Hambatan / Ancaman (*Threat*), merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian sungguh – sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara rinci faktor eksternal terdiri dari :

1) Peluang (*Opportunity*) ;

- a. Adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Keppres, Kepmen) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan;
- c. Adanya peran serta dan dukungan swasta dan masyarakat yang cukup tinggi;

- d. Semakin kokoh dan meluasnya kebijakan otonomi daerah dan demokratisasi;
- 2) Hambatan / Ancaman (*Threat*);
- a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
 - b. Belum optimal mekanisme perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat;
 - d. Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka disimpulkan isu-isu strategis dalam unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI SETDA

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Masalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

3.1 Indikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;
7. Belum adanya SDM perancang produk hukum daerah;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain.

Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan

profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3.2 Telaahan Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada lima tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Tanjung Jabung Barat Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Visi

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Berkualitas, Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.

Aman, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya mandalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Penjelasan :

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak

Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah.

Misi 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang

sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian.

Misi5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

MATRIK PENJABARAN VISI BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2021-2024

“TANJAB BARAT BERKAH”

Tanjung Jabung Barat yang “*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*”

NO	VISI	INDIKATOR	Sasaran RPJMD	RENSTRA
A.	BERKUALITAS			
1.	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat	1. IPM (indeks Pembangunan Manusia)	✓	
		2. IPG (indeks pengembangan Gender)	✓	✓
		3. IDG (indeks Pemberdayaan Gender)	✓	✓
		4. Angka Kematian Ibu (AKI)		✓
		5. Angka Kematian Bayi (AKB)		✓
		6. Angka Kematian Balita (AKABA)		✓
		7. Persentase Drop Out Keluarga Berencana		✓
		8. Angka Kemiskinan	✓	
		9. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	✓	✓
		10. Harapan Lama Sekolah (tahun)	✓	✓
B.	EKONOMI MAJU			
1.	Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup	1. Pertumbuhan Ekonomi	✓	
		2. Pengeluaran rill Perkapita (Rp.000)	✓	
		3. Tingkat Pengangguran terbuka (%)	✓	✓
		4. Pertumbuhan Ekspor (%/th)		✓
		5. Realisasi ekspor (%/th)		✓
		6. Realisasi PMA dan PMDN (Rp.Juta)		✓
		7. Peningkatan PDRB per Kapita (Rp Ribu)	✓	
		8. Laju Inflasi (%)	✓	
		9. Indeks Gini (ketimpangan ekonomi)	✓	
		10. Persentase Peningkaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (%)		✓
		11. Tingkat pemerataan perekonomian (%)		
		12. Tingkat keterpeliharaan kelestarian alam	✓	✓
		13. Tingkat keterpeliharaan lingkungan hidup		
C.	RELIGIUS			
	Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi	1. Tingkat Buta Aksara Al Qur.an		✓
		2. Tingkat pemberdayaan pengelola rumah ibadah		✓
		3. Tingkat kerukunan inter umat beragama dan antar umat beragama		✓

	seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan	4. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan Aktivitas Keagamaan masyarakat		✓
		5. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan keagamaan aparatur		✓
D.	KOMPETITIF			
	Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan	1. Tingkat pemberdayaan dan Pengembangan Sentra Ekonomi daerah		✓
		2. Tingkat nilai jual produk-produk UMKM		✓
		3. Tingkat pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif		✓
		4. Tingkat Produksi hasil Sumber Daya Daerah		✓
		5. Tingkat ketersediaan infrastruktur sebagai daya dukung daya saing daerah		✓
E.	AMAN			
	Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan inprastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif	1. Tingkat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3. Tingkat penyelesaian konflik 4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga iklim investasi		✓
F.	HARMONIS			
	Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama	1. Tingkat sinergisitas program pembangunan daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 2. Tingkat sinergisitas antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah 3. Tingkat sinergisitas antar OPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa. 4. Tingkat Kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya. 5. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan kearifan local		✓

MATRIK PENJABARAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2024

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tentram, Tertib Dan Demokratis.	Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Pengembangan Budaya Religius 2. Pengembangan Budaya Demokratis	1. Aparatur Pemerintah 2. Masyarakat	1. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 2. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 3. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	1.Koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi implementasi perda 2.Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD 3.Penyelesaian sengketa	Bag. Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 3. Fasilitasi Bantuan Hukum
	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Aparatur Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	1. Tidak adanya peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif. 2. Program pencegahan pelanggaran hukum dalam masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.	Evaluasi perda Sosialisasi, advokasi dan edukasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi, advokasi dan edukasi peraturan perundang-undangan		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	a. Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program perekonomian dan pembangunan	2. Pengembangan Budaya Demokratis	- Aparatur Pemerintah - Masyarakat	- Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bagian ADP	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pengelolaan BUMD dan BUMDES Secara Profesional	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pengelolaan BUMD dan BUMDES Secara Profesional	a.Aparatur b.Pemerintah BUMD c.BUMDES	a. Adanya manajemen yang baik dalam kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes. b. Adanya pembinaan manajemen pengelolaan yang baik pada BUMDes. c. Adanya kerjasama antara BUMD dengan BUMDes.	Sistem fit dan proper test untuk pimpinan dan pengelola BUMD, pelatihan pengelola BUMDes Kerjasama	Bag. Perekonomian Bag. Kerjasama	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat	Program perekonomian dan pembangunan	Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat	Masyarakat	1. Meningkatnya persentase hasil pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat.	Mengaktifkan lifting migas, pertemuan berkala dengan usaha pertambangan, pemanfaatan partisipasi interest, update data produksi dan lifting migas, TJSPL Migas	Bag. Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.OPD 2.Koperasi 3.UMKM	1.Bertumbuhnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2.Adanya inovatif dari OPD terkait dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Bantuan modal usaha, pelatihan manajemen, inovasi usaha, penguatan evaluasi dan pengawasan, peningkatan kerjasama,	Bag. Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
	Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas		Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas	1.OPD 2.Swasta	1.Adanya Inovasi OPD terkait dalam meningkatkan Investasi dan Ekspor Non-Migas.	Melakukan inovasi dalam substansi kegiatan peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas.	Bag Perekonomian	
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Dan Berkhak.	a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1.Mengaktifkan Kegiatan Keagamaan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama Yang Baik dan Benar	1.Masyarakat 2.Aparatur Pemerintah	1. Meningkatnya Partisipasi aparatur dalam kegiatan keagamaan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengamalan agamanya masing-masing	Pengajian, sholat berjamaah, bakti sosial, sosialisasi (aparatur) Pengajian, sholat berjamaah, bakti social, sosialisasi (masyarakat)	Kesra, Kesra,	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

			2. Peningkatan Kualitas, Penyebaran dan Kesejahteraan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji.	1. Da'i/ Muballigh, 2. Imam Masjid, 3. Bilal dan 4. Guru Ngaji	1. Meningkatnya SDM Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji 2. Penyebaran Da'i/ Muballigh sesuai dengan kebutuhan wilayah 3. Meningkatnya Kesejahteraan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji	Pelatihan, beasiswa, standar kualifikasi Penambahan jumlah / sebaran da'I dst. Meningkatkan besaran honorarium dai dst.	Kesra Kesra Kesra	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
			3. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama.	1. Pendidikan Agama 2. Guru Agama jenjang SD dan SMP	1. Terlibatnya pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama 2. Meningkatkan kualitas SDM guru agama jenjang SD dan SMP	Mata pelajaran agama, muatan lokal agama Pelatihan, beasiswa, standar kualifikasi	kesra kesra	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4. Peningkatan Prosentase Subsidi Pengembangan Pendidikan Agama di Pesantren dan Madrasah	- Pesantren dan Madrasah	Terlibatnya pemerinah daerah dalam Peningkatan Prosentase Subsidi Pengembangan Pendidikan Agama di Pesantren dan Madrasah	Fasilitasi dan koordinasi	kesra,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tenram, Tertib dan Demokratis	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi penyelesaian konflik	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Optimalisasi Pertambangan dan Migas bagi Kesejahteraan Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimalisasi Pertambangan dan Migas bagi Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hasil Pertambangan dan Migas bagi kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
	Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan melakukan gerakan hijau		Perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan	OPD Masyarakat	Terlaksananya dan Koordinasi dalam melakukan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pemerataan Pengembangan Daerah dari Desa sampai ke Kota	Sinergisitas antara Derah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada masyarakat		Sinergisitas antara daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada Masyarakat	OPD	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi dalam sinergisitas antara Daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada Masyarakat	asilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program perekonomian dan pembangunan	-Pengembangan Budaya Religius -Pengembangan Budaya Demokratis	- Aparatur Pemerintah - Masyarakat	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bag. Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Untuk Pelayanan Publik	1. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah		1.Adanya ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Transparansi pada peraturan dan prosedur partisipasi publik dalam preoses perencanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat.	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag. Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	2. Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Penempatan Aparatur		1. Adanya Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Penempatan Aparatur	1.Aparatur Pemerintah	1. Penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan 2. Adanya system terbuka penempatan aparatur 3. Penempatan aparatur didasarkan pada tingkat prilaku/moral, pendidikan, masa kerja, kompetensi, Pendidikan dan pelatihan/diklat, kepangkatan.	Berpedoman pada anjab dan evjab	Bag Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang beriman, berakhlak mulia	Peningkatan Kualitan pendidikan masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan mutu Pendidikan Dasar, menengah dan perguruan Tinggi	1.Pendidikan Dasar 2.Guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar 3.Pendidikan menengah 4.Perguruan Tinggi	Terlibatnya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan menengah dan perguruan tinggi	Koordinasi fasilitasi, dan kerjasama (beasiswa, pertukaran pelajar)	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram tertib dan demokratis	Penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.Aparatur pemerintah 2.Masyarakat 3.Kelompok masyarakat	Sinergitas program antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum	Rumah perlindungan saksi dan korban, sosialisasi pengutan psikolog, penguatan peran RT/lingkungan kerjasama, aksi bersama	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk pelayanan publik	Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional	1.Aparatur pemerintah 2.BUMD 3.BUMDes	Adanya kerjasama antara BUMD dan BUMDes	Kerjasama	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
Misi 3	Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat		Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat	1.OPD 2.Aparatur Pemerintah	Proses penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan ramah	Implementasi aplikasi pelayanan publik, penyederhanaan proses birokrasi	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah

						peningkatan kompetensi, briefing secara rutin		
4.Pemerataan pembangunan Daerah dari Desa sampai kota	Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower		Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower	1.OPD terkait	Adanya inovasi dan strategi OPD terkait dalam pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower	Koordinasi dan fasilitasi ke K/L alternatif akses telekomunikasi ke desa.	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Untuk Pelayanan Publik	a. Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan (<i>E-Governmant</i>)		1.Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan (<i>E-Governmant</i>)	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Terbentuk dan tersedianya system 2. Tersedianya Perangkat 3. SDM Aparatur	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Kominfo Bag. PBJ Bagian Umum/ Perlengkapan Setda Bagian Umum/ Kepegawian Setda	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	b. Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan (<i>E-Governmant</i>)		Peningkatan Efisiensi, Efektif dan Ramah dalam Melayani Masyarakat.	1.OPD 2.Aparatur pemerintah	1.Rumah dinas Bupati sebagai rumah rakyat, rumah singgah, tempat dialog	Penyediaan ruang singgah, ruang dialog, dan makan minum pertemuan	Penyediaan ruang singgah, ruang dialog, dan makan minum pertemuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

								Administrasi Umum Perangkat Daerah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Lapangan Usaha, Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja		Peningkatan Lapangan Usaha, Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja	1.OPD 2.Masyarakat	Integrasi rumah dinas dengan promosi produk industri rumah tangga	Integrasi rumah dinas dengan promosi produk industri rumah tangga	Bag Umum/ Rumah Tangga,	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
1.Mewujudkan kondisi Sosial yang tentram, tertib dan Demokratis	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	-Aparatur Pemerintahan -Kelompok Masyarakat -Masyarakat Umumnya	-Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	-Aktifnya siskamling dan Petugas Linmas	Bagian Tapem	Pengelolaan Administrasi
2.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Melakukan Upaya penyelesaian Tapal Batas	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	-Melakukan upaya Penyelesaian Tapal Batas	-OPD -Masyarakat	-Adanya Strategi baru dalam upaya penyelesaian Tapal Batas -Adanya Partisipasi Masyarakat dalam upaya penyelesaian Tapal Batas	-Pembentukan Tim Percepatan penyelesaian Tapal Batas, Meningkatkan koordinasi -Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam tim percepatan	Bagian Tapem	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

						penyelesaian tapal batas dalam rapat- rapat koordinasi		
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
		Program perekonomian dan pembangunan			1.Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bag.PBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Untuk Pelayanan Publik	a. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan (<i>E- Government</i>)		1.Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan (<i>E- Government</i>)	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Terbentuk dan tersedianya sistem 2. Tersedianya Perangkat 3. SDM Aparatur 4. Kesiapan jaringan, 5. Efisiensi pengelolaan, 6. Layanan online, 7. Portal daerah, 8. Government CIO (chief information officer) 9. promosi e-government, 10. E-participation, 11. Open government, 12. Cyber Security 13. Tercipta Kepercayaan 14. Adanya reliabilitas 15.Dukungan kepada masyarakat yang perlu diakomodir dalam kebijakan e- government	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
	b. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan		- Adanya ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	- OPD - Aparatur OPD	1. Tingkat keterbukaan pada proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Transparansi pada	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

	Daerah		Daerah		peraturan dan prosedur partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Transparansi melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan daerah.		Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--

3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Menjadikan rumah dinas Bupati sebagai rumah rakyat
2. Mengaktifkan kegiatan keagamaan, meningkatkan sarana prasarana ibadah serta meningkatkan kulaitas, penyebaran dan kesejahteraan da'i imam masjid, bilal dan guru ngaji sehingga terbangunnya budaya religius
3. Memberikan biaya siswa pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3
4. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, listrik, tower, air bersih dan kawasan potensial yang sulit dijangkau pembangunan serta hilirisasi industri.
5. Pemeberdayaan dan pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasisi rumah ibadah dan kelompok keagamaan.
6. Melakukan gerakan masyarakat sadar stunting (gemasting), peningkatan biaya operasional pukesmas untuk pelayanan masyarakat kurang mampu, serta penyediaan ambulance air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Membentuk dan mendorong milenia enterpreuner movement (Memo) agar warga Tanjung Jabung Barat memiliki mental berwiraswasta yang inovatif dan bersaing di era industri 4.0
8. Membuat cetak sawah, pembelian bibit dan pupuk secara berkala dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa menuju swasembada
9. Optimalisasi balai pelatihan kerja dalam menjawab kebutuhan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Meningkatkan kinerja birokrasi, membentuk lembaga pengaduan masyarakat dalam rangka percepatan penyelesaian konflik lahan di Kabuapten Tanjung Jabung Barat

4. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.

Pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui

ekonomi kerakyatan.

8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Berdasarkan Misi dan Tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Sekretariat Daerah Mengacu Kepada Misi Ke 4 : *"Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik".*

3.3 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Visi Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yaitu **JAMBI MANTAP**, yakni :

"TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT"

Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif bersih dan melayani dengan didukung e-goverment yang terintegrasi.
2. Memantapkan kualitas infrastruktur Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan, Pembinaan dan pengelolaan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berbasis agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Memantapkan perekonomian daerah, pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim .
5. Memantapkan kualitas sumber daya manusia, yang berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, social budaya dan kesetaraan gender .

Tabel. V

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Sasaran pada Renstra Provinsi Jambi	Sasaran pada Kementerian Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah dokumen perencanaan Setda	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas.	Meningkatnya pelayanan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
2	Frekuensi pengelolaan keuangan Setda dan Pimpinan			
3	Pengelolaan keuangan Setda dan pimpinan			
4	Terlaksananya Penyusunan laporan akuntabilitas daerah kinerja instansi Setda dan penyusunan laporan pengendalian keuangan Setda			
5	persentase koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, kunker/inspeksi KDH/WKDH			
6	Aset tercatat dengan akurat			
7	Persentase fasilitasi pakaian dinas aparatur sipil negara	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		
8	Persentase fasilitasi koordinasi kegiatan dalam dan luar daerah (kegiatan administrasi kepegawaian, kegiatan disiplin pegawai ,kegiatan jasa administrasi staf ahli)			
9	Persentase belanja kursus nasional dan sosialisasi serta bimtek bagi apartur pemerintah			
10	Persentase layanan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas			
11	Persentase fasilitasi peralatan rumah dinas/jabatan			
12	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas			
13	Persentase pendistribusian dan pengelolaan surat masuk dan keluar Setda			
14	Persentase pasilitasi pemilihan gedung kantor			

15	Persentase pengelola surat masuk dan surat keluar Setda		Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	
16	Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara			
17	Persentase fasilitasi pelayan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
18	Persentase Ruang Kerja dalam Kondisi Bersih			
19	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional dalam Keadaan Baik			
20	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara			
21	Persentase peralatan gedung kantor berfungsi baik			
22	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			
23	Persentase peralatan gedung kantor berfungsi baik			
24	Jumlah Regulasi Kelembagaan	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
25	Jumlah tersusun nya analisis jabatan dan analisis beban kerja.			
26	Jumlah Regulasi Kebijakan Ketatalaksanaan			
27	Jumlah Tersusun nya Laporan Operasional Prosedur			
28	persentase kepuasan masyarakat			
29	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instasni Pemerintah,Jumlah Laporan pelaksanaan repormasi,Birokrasi daerah			
30	Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah			
31	Terlaksananya Kegiatan KeProtokolan Pimpinan	Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Media Massa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan Pimpinan	Meningkatnya kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi yang tangguh dan handal sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.	
32	jumlah media jurnal/surat kabar/majalah yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah			
33	frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah, jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital dan sewa billboard area bandara			
34	Jumlah laporan administrasi pemerintahan daerah dan Jumlah pelaksanaan event dalam rangka peningkatan nilai	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah		

	kebangsaan dan daerah			
35	Jumlah tanda batas kabupaten, kecamatan, Jumlah laporan			
36	Peringkat capaian Prestasi Camat teladan/Berprestasi tingkat kabupaten			
37	Kecamatan dengan indeks kepuasan masyarakat kategori baik dan jumlah kelurahan yang menerima dana kelurahan			
38	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dan Provinsi			
39	Jumlah Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji serta Pengiriman TKHD	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah dan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan,Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jamaah Haji, Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat, Menurunnya Angka Pasangan yang tidak memiliki Dokumen Pernikahan.		
40	Jumlah Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Provinsi			
41	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Dua Hari Raya Di 13 Kecamatan			
42	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan			
43	jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an			
44	Jumlah Penyelesaian Proses Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat di Dua kecamatan			
45	Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ			
46	Jumlah Dai Desa yang diberi pembinaan,	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Ilmu Keagamaan		Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
47	Jumlah guru ngaji yang diberi insentif pembinaan			
48	Jumlah Guru agama Imam Mudin dan guru Ngaji Ustad Pengajian Mualap/Pembinaan ilmu Agama			
49	Jumlah Pertemuan Forum Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah		
50	Keputusan bupati	Aparatur dan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat yang agamis, bermoral, serta Harmonis	
51	Peraturan bupati			
52	Peraturan daerah			
53	Penyelesaian sengketa dan pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat			
54	terciptanya aparatur dan masyarakat yang menngerti HAM			
55	Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu			
56	Tertatanya produk hukum daerah yang tertib			
57	Penyusunan kerjasama dalam negeri, penyusunan dokumen MOU dan PKS kerjasama dalam negeri, terlaksana sosialisasi kerjasama dalam negeri dan rakor evaluasi pelaksanaan kerjasama kab.	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah/Lembaga/Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

	Tanjab barat			
58	Terlaksananya sosialisasi potensi kerjasama tanjung jabung barat melalui forum kerja sama luar negeri dan tersedianya potensi kerjasama luar negeri			
59	Terlaksananya bahan pelaksanaan perumusan kebijakan evaluasi dalam dan luar negeri, terlaksananya evaluasi rakor evaluasi pelaksanaan kerjasama			
60	Jumlah monitoring,laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD Jumlah BUMD yang diberikan subsidi	Terselenggaranya koordinasi penataan kebijakan terkait bidang perekonomian dengan efektif dan efisien		
61	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah dan Jumlah laporan TPID			
62	Jumlah monitoring pembinaan dan laporan KUPEM			
63	Jumlah monitoring dan laporan penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran			
64	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat			
65	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah		
66	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring		Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
67	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD dan pelaporan laporan tepra melalui sismonteptra			
68	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa			
69	Jumlah pemeliharaan Co. Location,	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif		
70	Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala			
71	Jumlah peserta sosialisasi Dan peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar			
72	Jumlah rapat-rapat koordinasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan pembangunan, dan kerjasama daerah.	
73	Jumlah Laporan evaluasi			
74	Jumlah rapat-rapat koordinasi pertambangan dan lingkungan hidup			
75	Jumlah Laporan evaluasi			
76	Jumlah rapat-rapat koordinasi sumber energi dan air			
77	Jumlah Laporan evaluasi			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Adapun maksud dari penataan ruang kabupaten yaitu :

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di Daerah.

RTRWK berfungsi sebagai :

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. acuan dalam administrasi pertanahan.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah;
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengolahan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kabupaten terdiri atas:

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

3.5. Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean*

government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

1.	Visi	Misi ke- 3	Tujuan	
	Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab
			2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah

No	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					SUMBER DATA	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
			Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN UMUM
			Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN UMUM
		1.2. Menigkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	32	35	40	43	43	BAGIAN ORGANISASI
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,66	80,66	80,70	80,75	85	88,31	
			Nilai AKIP Kabupaten	>60,01	>60,01	>61,50	>62,50	>70,01	>70,50	
		1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PROTOKOL

2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1. Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N TATA PEMER INTAH AN
			Skor LPPD	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	
		2.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N KESRA
		2.3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N HUKU M
		2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N KERJAS AMA
		2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N PEREK ONOMI AN
		2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N ADP
			Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N PENG DAAN BARAN G & JASA
		2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIA N SDA

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2021 – 2026) sebagai berikut :

Tabel T.C. 26.

VISI: Strategi “TANJAB BARAT BERKAH 2024” Tanjung Jabung Barat yang “*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*”

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Hukum)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.Terselenggara nya tata kelola pemerintaha n daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Aparatur dan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak saling bertentangan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan kebijakan daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah seluruh produk hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah, Jumlah Peraturan Bupati, Jumlah Peraturan Daerah.
3.1.2. Meningkatny a kualitas pelayanan publik								
							Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penyelesaian sengketa, Jumlah Laporan Aksi HAM
							Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum disebarluaskan dan Jumlah masyarakat yang mendapat Penyuluhan Hukum

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Perencanaan dan Keuangan)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas	Persentase keselarasan perencanaan, keuangan dan pelaporan Setda terhadap RPJMD	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Aset tercatat dengan akurat
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan keuangan Setda dan pimpinan
Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian ADP)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Program perekonomian dan Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah buku data pembangunan Kab. Tanjab Barat
								Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

							Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring
							Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lppk dan rekap program OPD
								Jumlah pelaporan laporan tepra melalui sismonteptra
Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Bagian Perekonomian)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
4.1.1. Meningkatkan perekonomian kabupaten	Terkendalnya laju inflasi	Persentase inflasi daerah	Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan pengendalian terhadap inflasi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perekonomian daerah
								Frekuensi pelaksanaan monitoring perkembangan perekonomian daerah
								Jumlah dokumen pelaporan TPID

								Jumlah dokumen pelaporan perkembangan harga sembako
							Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran
								Jumlah laporan pupuk
								Jumlah monitoring pembinaan KUPEM
								Jumlah laporan KUPEM

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak (Bagian Kesra)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.1 Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan Dilandasi Iman dan Taqwa Serta Berakhlak Mulia	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Partisipasi Aparatur dan Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengajian Keagamaan (ASN)
								Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pengajian Keagamaan (Masyarakat)
						Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Permohonan Hibah Sarana/Prasarana Ibadah
								Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Permohonan Hibah Sarana/Prasarana Pendidikan Keagamaan
								Jumlah Fasilitasi, Verifikasi,

								Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Permohonan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Sosial
						Meningkatnya SDM Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji		Jumlah Peserta Pelatihan Da'I Desa/Kelurahan
						Meningkatnya Kesejahteraan dan Penyebaran Da'i/ Muballigh sesuai dengan Kebutuhan Wilayah		Jumlah Pembinaan Da'i Pembina Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
						Meningkatnya Kesejahteraan Imam Masjid, Bilal, Guru Ngaji, Mudim, Guru Agama		Jumlah Guru Minggu yang diberikan Insentif Pembinaan
								Jumlah Guru Agama, Imam, Mudim dan Guru Ngaji, Bilal diberi Pembinaan
						Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pertemuan Forum

							Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten
MISI 2 : Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tentram, Tertib Dan Demokratis.								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah	Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Aktifitas Keagamaan dalam Pemerintahan dan Masyarakat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan
								Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan
								Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi yang diikuti
								Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ
								Jumlah Pembinaan Pengembangan Tilawatil Qur'an yang dilaksanakan

						Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Keagamaan Aparatur		Jumlah Peserta Pelatihan Takmir Masjid
								Jumlah Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Safari Subuh dan Jum'at
						Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi
						Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jamaah Haji		Jumlah Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji serta Pengiriman TKHD
						Meningkatnya Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Koordinasi Terkait Kerukunan Umat Beragama
						Menurunnya Angka Pasangan yang tidak memiliki Dokumen Pernikahan		Jumlah Penyelesaian Proses Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat

						Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Keagamaan Aparatur		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Dua Hari Raya di 13 Kecamatan
MISI 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis (Bagian SDA)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
2.1.1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam Setda yang kondusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	1. Jumlah rapat di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 2. Jumlah permasalahan yang terfasilitasi 3. Jumlah pelaksanaan monitoring kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
MISI 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
4.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam Setda yang kondusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	1. Jumlah rapat koordinasi di bidang pertambangan dan lingkungan hidup

						bidang Pertambanga n dan Lingkungan Hidup	dan Lingkungan Hidup	2. Jumlah pelaksanaan monitoring kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup
MISI 5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai Kota								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
5.1.1.Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam Setda yang konduusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Fasilitasi, Koordinasi dan Pemantuan bidang Sumber Daya Air dan Energi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1. Jumlah rapat koordinasi di bidang Energi dan Air 2. Jumlah Pelaksanaan monitoring kegiatan di bidang Energi dan Air
MISI 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Bagian Organisasi)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
Tujuan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan akuntabel Sasaran 3.1.1 Meningkatkan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Kelembagaan Yang Efektif	- Nilai AKIP Kabupaten - Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Program Administrasi Umum	- Nilai AKIP Kabupaten - Indeks kepuasan masyarakat - Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	- Jumlah Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan	- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Fasilitasi Pelayanan	- jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi - Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah/ LKjIP - Jumlah OPD yang dilakukan survey

Akutabilitas Kinerja Pemerintah						Tatalaksana - Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Publik dan Tatalaksana - - Pengelolaan kelembagaan dan analisis Jabatan	IKM - Jumlah Dokumen SOP - Jumlah Regulasi Kebijakan Ketatalaksanaan - Jumlah laporan inovasi daerah - Jumlah Regulasi Kelembagaan - Jumlah Dokumen Analis Jabatan dan Analisis Beban Kerja - Jumlah Dokumen standar Kompetensi Jabatan
3.1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								
MISI 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Bagian Kerjasama)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
4.1.1 Meningkatnya Perekonomian Kerakyatan	Fasilitasi Kerja Sama antar Daerah,Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Daerah,Lembaga/ Perseorangan Dalam Negeri	Program Kerja Sama Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya kerja sama Pembangunan Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama Daerah, Lembaga/ Perseorangan dalam Negeri	Sosialisasi	Terlaksananya Sosialisai
		Terlaksananya fasilitasi kerja sama antar daerah,Lembaga/ perseorangan luar Negeri			Kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama daerah, lembaga / Perseorangan Luar Negeri	Penyusunan Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen

		Terlaksananya monitoring evaluasi kerja sama daerah, Lembaga/ Perseorangan dalam negeri& Luar Negeri			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan kerja sama	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kerja sama daerah, Lembaga/ Perseorangan dalam Negeri & Luar Negeri	Monitoring Evaluasi	Terlaksananya Monitoring Evaluasi
MISI 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Umum)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan Serta Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan yang baik dan terpelihara Serta Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang Tersedia
		Persentase Pemenuhan Fasilitas untuk Pelayanan Kantor dan administrasi surat menyurat seta Administrasi kepegawaian terlaksana			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Jumlah Fasilitas Koordinasi Kegiatan Staf Ahli Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang Dijalankan

								Jumlah Waktu Fasilitasi Makanan dan Minuman Staf Ahli
MISI 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Umum)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah peserta pendidikan/pelatihan yang di Fasilitasi Jumlah Waktu pendistribusian dan pengelola surat masuk dan surat keluar Setda Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Air Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Internet/ TV Berlangganan Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Listrik Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Telepon

							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan/ Pembersih Kantor Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor
		Persentase Peningkatan Jamuan Tamu Pimpinan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK) yang tersedia Jumlah peralatan rumah tangga yang Tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor (Alat Listrik, Alat dan Bahan Pembersih/Kebersihan) Rumah Dinas/Jabatan yang Tersedia Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Rumah Dinas/Jabatan Jumlah barang cetakan (blanko atau formulir, Buku, Map) dan Pengandaan yang Tersedia
		Persentase Sarana dan Prasarana (Aset Setda) dalam Kondisi Baik			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan OPD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara

							Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Humas)

Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemerintah Daerah Yang Berkualitas dan Transparan	Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Media Massa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan Pimpinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelaksanaan Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan
								Dokumen kegiatan keprotokolan
						Meningkatnya Pelaksanaan	Fasilitasi Komunikasi	Media jurnal/surat kabar/majalah yang

						Komunikasi Pimpinan	Pimpinan	dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah
								Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah
						Terlaksananya Dokumentasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital
								frekuensi sewa billboard

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Tapem)

Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Skor Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab.Tanjung Jabung Barat	Skor Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab.Tanjab Barat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai/Skor LPPD Kabupaten/ Kota	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai/Skor LPPD Kabupaten	Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan

MISI 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis (Bagian PBJ)

Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tenteram, tertib dan rukun antar umat beragama, Lapisan Masyarakat dan Kelompok	Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan infrastruktur	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tepat waktu	Perekonomian dan Pembangunan	- Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tepat waktu - Upaya Penyediaan informasi APBD	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang ditindak lanjuti	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa

				oleh Pemerintahan Daerah				
Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik Untuk Pelayan Publik (Bagian PBJ)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa tepat waktu	Perekonomian dan Pembangunan	- Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tepat waktu - Terbentuk dan tersedianya system pelayanan Pengadaan secara elektronik	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang ditindak lanjuti	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pemeliharaan Co.Location, jumlah server yang dilakukan pengecekan dan servis berkala

BAB. VI

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian.

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, terdapat indikator Kinerja yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar
2. Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi
3. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur
4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS
5. Terselenggaranya Penyebaran Informasi
6. Meningkatkan Koordinasi Pelestarian SDA dan Flora Fauna Endemik
7. Meningkatkan pengelolaan BUMD dan Peningkatan Investasi lainnya
8. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kabupaten (ruas batas)
9. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kecamatan (ruas batas)
10. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Desa/kelurahan (ruas batas)
11. Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
12. Peningkatan sistem pelaksanaan bantuan dan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang transparan
13. Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan pembangunan
14. Peningkatan Pelayanan PATEN di Kecamatan
15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16. Terbit dan terlaksananya sistem penyebar luasan informasi secara transparan
17. Peningkatan kualitas dan penyebar luasan produk hukum serta pendampingan hukum (Perda, PerBup, SK)

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel penyajian Tabel. IX dan Tabel **T.C. 27.**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Prorgam dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab	1.1.Meningkatnya kualitas perencanaan ,keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	42.998.406.900	100%	50.570.376.759	100%	57.163.054.514	100%	61.716.812.522	100%	66.699.514.815	100%	72.792.092.638	100%	346.558.509.656	Sekretariat Daerah	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	61.100.000	100%	94.811.000	100%	110.500.000	100%	111.025.000	100%	116.525.000	100%	122.350.000	100%	616.311.000	Perencanaan dan Keuangan	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	10 Dokumen	10 Dokumen	61.100.000	10 Dokumen	94.811.000	10 Dokumen	110.500.000	10 Dokumen	111.025.000	10 Dokumen	116.525.000	10 Dokumen	122.350.000	10 Dokumen	616.311.000		
				Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen							
		'4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	17.777.838.700	100%	23.299.462.272	100%	26.355.996.839	100%	27.752.635.931	100%	29.226.134.152	100%	30.780.549.928	100%	155.192.617.822		
		'4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	16.732.533.700	12 Bulan	22.072.522.272	12 Bulan	24.819.911.839	12 Bulan	26.060.907.431	12 Bulan	27.363.952.802	12 Bulan	28.732.150.443	12 Bulan	145.781.978.487		
		'4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	63 orang	63 orang	935.305.000	63 orang	1.079.040.000	63 orang	1.375.000.000	63 orang	1.512.500.000	63 orang	1.663.750.000	63 orang	1.830.125.000	63 orang	8.395.720.000		
		'4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	2 laporan	2 laporan	58.325.000	2 laporan	88.550.000	2 laporan	80.150.000	2 laporan	90.200.000	2 laporan	100.500.000	2 laporan	110.550.000	2 laporan	528.275.000		
				Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dok	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		10 Dok					
		'4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	51.675.000	1 Dokumen	59.350.000	1 Dokumen	80.935.000	1 Dokumen	89.028.500	1 Dokumen	97.931.350	1 Dokumen	107.724.485	5 Dokumen	486.644.335		
				Jumlah dokumen pelaporan setda	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		20 Dokumen									
1.Meningkatkan kualitas tatakelola	1.1.Meningkatnya kualitas	'4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	100%	648.918.800	100%	1.086.826.800	100%	898.289.800	100%	987.018.780	100%	1.084.720.65	100%	1.191.192.724	100%	5.896.967.562	Bagian Umum	Kab. Tanjab Barat

pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab	perencanaan ,keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat													8					
		'4.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang tersedia	542 stel	100%	346.518.800	542 stel	706.031.800	556 stel	736.485.300	567 stel	809.033.830	569 stel	889.937.213	570 stel	978.930.934	542 stel	4.466.937.877
		'4.01.0 1.2.05. 04	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitas Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	3 Staf Ahli	3 Staf Ahli	252.400.000	3 Staf Ahli	330.795.000	3 Staf Ahli	61.804.500	3 Staf Ahli	67.984.950	3 Staf Ahli	74.783.445	3 Staf Ahli	82.261.790	3 Staf Ahli	870.029.685
				Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	2 Aplikasi	2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi					
				Jumlah Waktu Fasilitas Makanan dan Minuman Staf Ahli	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan					
		'4.01.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	15 Orang	2 Orang	50.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	100.000.000	15 Orang	110.000.000	15 Orang	120.000.000	15 Orang	130.000.000	15 Orang	560.000.000
		'4.01.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	10.348.720.435	12 Bulan	10.153.161.994	12 Bulan	10.527.232.604	12 Bulan	11.579.955.863	12 Bulan	12.737.951.449	12 Bulan	14.011.746.594	12 Bulan	69.358.768.939
		'4.01.0 1.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	259.856.864	12 Bulan	287.563.865	12 Bulan	316.320.252	12 Bulan	347.952.277	12 Bulan	382.747.504	12 Bulan	421.022.255	12 Bulan	2.015.463.017
				Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan					
		"4.01.0 1.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	11 Jenis/Item	11 Jenis/Item	438.890.338	11 Jenis/Item	497.285.257	11 Jenis/Item	547.013.783	11 Jenis/Item	601.715.161	11 Jenis/Item	661.886.677	11 Jenis/Item	728.075.345	11 Jenis/Item	3.474.866.561
		'4.01.0 1.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 Jenis/Item	60 Jenis/Item	895.727.658	60 Jenis/Item	154.496.158	60 Jenis/Item	95.021.520	60 Jenis/Item	104.523.672	60 Jenis/Item	114.976.039	60 Jenis/Item	126.473.643	60 Jenis/Item	1.491.218.690
		'4.01.0 1.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan)kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.948.228.220	12 Bulan	2.423.542.929	12 Bulan	256.737.800	12 Bulan	282.411.580	12 Bulan	310.652.738	12 Bulan	341.718.012	12 Bulan	5.563.291.279
Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan									
'4.01.0 1.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	7 Jenis/Item	7 Jenis/Item	46.009.355	7 Jenis/Item	51.211.335	7 Jenis/Item	109.132.469	7 Jenis/Item	120.045.715	7 Jenis/Item	132.050.287	7 Jenis/Item	145.255.315	7 Jenis/Item	603.704.476		
'4.01.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu kunjungan tamu yang difasilitasu	-	-	-			12 Bulan	1.023.058.300	12 Bulan	1.125.364.130	12 Bulan	1.237.900.543	12 Bulan	1.361.690.597	12 Bulan	4.748.013.570		

1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab	1.1.Meningkatnya kualitas perencanaan ,keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	'4.01.01.2.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	6.760.008.000	12 bulan	6.739.062.450	12 bulan	8.179.948.480	12 bulan	8.997.943.328	12 bulan	9.897.737.661	12 bulan	10.887.511.427	12 bulan	51.462.211.346	Bagian Renkeu	Kab. Tanjab Barat
1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab	1.1.Meningkatnya kualitas perencanaan ,keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	'4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%	1.169.530.100	100%	3.677.619.100	100%	2.576.581.010	100%	2.834.239.111	100%	3.117.663.022	100%	3.429.429.324	100%	18.295.342.205	Bagian Umum	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan yang Tersedia			1.490.280.538	2 Unit	1.560.000.000	13 Unit	1.716.000.000	14 Unit	1.887.600.000	15 Unit	2.076.360.000	20 Unit	2.283.996.000		11.014.236.538		
		'4.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	- Jumlah Waktu Pengadaan Mebel yang tersedia			-			12 Bulan	211.103.200	12 Bulan	232.213.520	12 Bulan	255.434.872	12 Bulan	280.978.359	12 Bulan	979.729.951		
		'4.01.01.2.07.06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	35 Jenis/Item	35 Jenis/Item	1.169.530.100	35 Jenis/Item	2.117.619.100	35 Jenis/Item	649.477.810	35 Jenis/Item	714.425.591	35 Jenis/Item	785.868.150	35 Jenis/Item	864.454.965	35 Jenis/Item	6.301.375.716		
		'4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.668.505.523	100%	3.274.260.675	100%	4.596.405.000	100%	5.056.045.500	100%	5.561.650.050	100%	6.117.815.056	100%	29.274.681.804		
		'4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	12 bulan	12 bulan	463.425.000	12 bulan	463.825.000	12 bulan	510.207.500	12 bulan	561.228.250	12 bulan	617.351.075	12 bulan	679.086.183	12 bulan	3.295.123.008		
		'4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	12 bulan	12 bulan	1.840.500.000	12 bulan	1.840.500.000	12 bulan	1.999.800.000	12 bulan	2.199.780.000	12 bulan	2.419.758.000	12 bulan	2.661.733.800	12 bulan	12.962.071.800		
				Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun									
				Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan									
'4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	1.727.115.000	12 bulan	336.725.000	12 bulan	370.397.500	12 bulan	407.437.250	12 bulan	448.180.975	12 bulan	492.999.073	12 bulan	3.782.854.798				

		'4.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	45 Jenis/Ite m	45 Jenis/It em	637.465. 523	45 Jenis/It em	633.210.67 5	45 Jenis/It em	1.716.00 0.000	45 Jenis/ Item	1.887. 600.00 0	45 Jenis/It em	2.076. 360.00 0	45 Jenis/ Item	2.283.99 6.000	45 Jenis/It em	9.234.6 32.198				
				Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan							
		'4.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	4.970.92 4.300	100%	5.198.369. 000	100%	5.788.38 5.900	100 %	6.367. 224.49 0	100%	7.003. 946.93 9	100 %	7.704.34 1.634	100%	37.033. 192.26 3				
		'4.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	88 Unit	88 Unit	2.624.16 9.000	88 Unit	2.717.169. 000	88 Unit	2.988.88 5.900	88 Unit	3.287. 774.49 0	88 Unit	3.616. 551.93 9	88 Unit	3.978.20 7.133	88 Unit	19.212. 757.46 2				
				Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan							
		'4.01.0 1.2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Waktu Pemeliharaan Mebel					12 bulan	70.180.0 00	12 bulan	77.198 .000	12 bulan	84.917 .800	12 bulan	93.409.5 80	12 bulan	325.70 5.380					
		'4.01.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	12 bulan	12 bulan	691.401. 800	12 bulan	787.165.00 0	12 bulan	865.881. 500	12 bulan	952.46 9.650	12 bulan	1.047. 716.61 5	12 bulan	1.152.48 8.277	12 bulan	5.497.1 22.842				
		'4.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedun g	1.655.35 3.500	1 Gedun g	1.694.035. 000	1 Gedung	1.863.43 8.500	1 Gedu ng	2.049. 782.35 0	1 Gedung	2.254. 760.58 5	1 Gedu ng	2.480.23 6.644	1 Gedung	11.997. 606.57 9				
				Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Banguna n	3 Bangun an		3 Bangun an		3 Bangun an		3 Bangun an		3 Bangun an									
		'4.01.0 1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Persentase gaji dan Operasional KDH/WKDH yang dibayarkan	100%	100%	1.062.20 7.900	100%	1.067.651. 894	100%	1.640.23 3.890	100 %	1.714. 903.06 9	100%	1.792. 911.45 5	100 %	1.874.44 6.583	100%	9.152.3 54.791			Bagian Renke u	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.0 1.2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	2 orang	2 orang	1.062.20 7.900	2 orang	1.067.651. 894	2 orang	1.171.08 4.210	2 orang	1.229. 638.42 1	2 orang	1.291. 120.34 2	2 orang	1.355.67 6.359	2 orang	7.177.3 79.126				
		'4.01.0 1.2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah orang yang difasilitasi untuk pakaian Dinas	2 orang					2 orang	41.149.6 80	2 orang	45.264 .648	2 orang	49.791 .113	2 orang	54.770.2 24	2 orang	190.97 5.665				
		'4.01.0 1.2.11. 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-Jumlah Waktu Penyedian Dana Operasional KDH/WKDH	12 Bulan					12 Bulan	428.000. 000	12 Bulan	440.00 0.000	12 Bulan	452.00 0.000	12 Bulan	464.000. 000	12 Bulan	1.784.0 00.000				
		04.01.0 1.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia						100%	1.480.72 1.618	100 %	1.628. 793.78 0	100%	1.791. 673.15 9	100 %	1.970.84 0.473	100%	6.872.0 29.030			Bagian Umum	Kab. Tanjab Barat

		04.01.01.12.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						12 bulan	844.110.222	12 bulan	928.521.244	12 bulan	1.021.373.369	12 bulan	1.123.510.705	12 bulan	3.917.515.540								
		04.01.01.12.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						12 bulan	479.751.889	12 bulan	527.727.078	12 bulan	580.499.786	12 bulan	638.549.764	12 bulan	2.226.528.517								
		04.01.01.12.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						12 bulan	156.859.507	12 bulan	172.545.458	12 bulan	189.800.004	12 bulan	208.780.004	12 bulan	727.984.973								
1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab	1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	'4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	100%	100%	403.997.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.997.473	Bagian Organisasi	Kab. Tanjab Barat						
		'4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	3 OPD	3 OPD	112.871.156	-		-		-		-		-		3 OPD	112.871.156								
				Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 Perbup	3 Perbup		-		-		-		-		3 Perbup											
				Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen		-		-		-		-		1 Dokumen											
				Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen		-		-		-		-		1 Dokumen											
		'4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	124.995.606	-		-		-		-		-		-				80%	124.995.606				
				Persentase Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	124.995.606	-				-				-						-		-		100%	124.995.606
				Jumlah Tersusunnya Laporan SOP	25 SOP	25 SOP		-				-				-						-		25 SOP			
				Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 Regulasi	2 Regulasi		-				-				-						-		2 Regulasi			
				Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen		-				-				-						-		1 Dokumen			
				Data Inovasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		-				-				-						-		1 Dokumen			
		'4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP Kabupaten	100%	100%	166.130.711	-		-		-		-		-		-				100%	166.130.711				
				Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	166.130.711	-				-				-						-		-		1 Laporan	166.130.711
				Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan	1 Laporan		-				-				-						-		1 Laporan			

			4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29		-	29	1.190.000.000	32	1.309.000.000	35	1.439.900.000	40	1.583.890.000	43	2.383.241.500	43	7.906.031.500		
			'4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah regulasi kelembagaan	3 regulasi	-	-	3 regulasi	375.000.000	3 regulasi	412.500.000	3 regulasi	453.750.000	3 regulasi	499.125.000	3 regulasi	749.037.500	15 regulasi	2.489.412.500		
					Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	1 Dokumen	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen							
					Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	1 Dokumen	-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen							
			'4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.66	-	-	80,66	465.000.000	80,7	511.500.000	80,75	562.650.000	85	618.915.000	88,31	880.806.500	88,31	3.038.871.500	3.038.871.500	
					Jumlah dokumen SOP	1 Dokumen	-		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen									
					Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik	1 Laporan	-		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan									
					Jumlah OPD yg dilakukan survey IKM	44 OPD	-		44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD									
					Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	1 Regulasi	-		1 Regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	5 regulasi									
			'4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP Kabupaten	>60,01	-	-	>60,01	350.000.000	>61,50	385.000.000	>62,50	423.500.000	>70,01	465.850.000	>70,50	753.397.500	>70,50	2.377.747.500	2.377.747.500	
					Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)	1 Laporan	-		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan									
					Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Laporan	-		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan									
	1.2.Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan KDH/WKDH dan Setda Kab. Tanjab Barat		'4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	12 Bulan	1.799.238.669	100%	1.433.614.024	100%	1.773.923.603	100%	2.128.708.323	100%	2.554.449.988	100%	3.065.339.985	100%	12.755.274.592	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Tanjab Barat
			'4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan	12 Bulan	12 Bulan	177.019.800	12 Bulan	425.959.800	12 Bulan	526.871.760	12 Bulan	632.246.112	12 Bulan	758.695.334	12 Bulan	910.434.401	12 Bulan	3.431.227.207		
					Jumlah dokumen kegiatan keprotokolan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen							
			'4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	12 Bulan	12 Bulan	395.488.000	-		-		-		-		-		-	395.488.000		
					Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah	90 media	90 media		-		-		-		-							

				Frekuensi pengelolaan dokumen laporan kegiatan pimpinan	12 Buah	-		12 Buah	564.975.000	12 Buah	702.300.000	12 Buah	842.760.000	12 Buah	1.011.312.000	12 Buah	1.213.574.400	12 Buah	4.334.921.400		
				Jumlah bahan bacaan pimpinan Sekretariat Daerah	36000 Exp	-		36000 Exp		40000 Exp		45000 Exp		50000 Exp		55000 Exp		60000 Exp			
		'4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	1.226.730.869												1.226.730.869		
				Frekuensi sewa billboard area bandara	16 Kali	16 Kali															
				Frekuensi pengelolaan data dokumentasi kegiatan pimpinan	12 Bulan			12 Bulan	442.679.224	12 Bulan	544.751.843	12 Bulan	653.702.211	12 Bulan	784.442.654	12 Bulan	941.331.184	12 Bulan	3.366.907.116		
				Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemma	2.1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah	'4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	10.957.607.020	100%	16.172.761.765	100%	17.753.900.000	100%	19.409.800.000	100%	21.159.760.000	100%	23.006.296.000	100%	108.460.124.785	Bagian Tapem	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	3<STSA ST	3<STS AST	708.161.695	3<STS AST	1.395.000.000	3<STS AST	1.571.900.000	3<STSAST	1.711.200.000	3<STSAST	1.806.400.000	3<STSAST	1.846.200.000	3<STSAST	9.038.861.695		
		'4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	296.879.780	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	575.900.000	1 Laporan	620.000.000	1 Laporan	685.900.000	1 Laporan	695.000.000	1 Laporan	3.423.679.780		
				Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan					
				Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan	2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.	2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.		2 Event (HUT RI & Hari Jadi Kab.					
				Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres	13 Kecamatan							13 Kecamatan									
		'4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	1 Laporan	1 Laporan	201.711.500	1 Laporan	420.000.000	1 Laporan	525.500.000	1 Laporan	580.500.000	1 Laporan	590.000.000	1 Laporan	610.500.000	1 Laporan	2.928.211.500		
				Jumlah Tanda Batas Kabupaten	4 Tanda	4 Tanda		4 Tanda		4 Tanda		4 Tanda		4 Tanda		4 Tanda					
				Jumlah tanda batas Kecamatan	8 Tanda	8 Tanda		8 Tanda		8 Tanda		8 Tanda		8 Tanda		8 Tanda		8 Tanda			
		'4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	209.570.415	13 Kecamatan	425.000.000	13 Kecamatan	470.500.000	13 Kecamatan	510.700.000	13 Kecamatan	530.500.000	13 Kecamatan	540.700.000	13 Kecamatan	2.686.970.415		

				Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rakor	1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor			
				Jumlah laporan pengawsan pelaksanaan PATEN	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			
				Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, pengganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan			
2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemda	2.2. Meningkatkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	'4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	8.752.054.088	100%	12.560.000.000	100%	13.816.000.000	100%	15.197.600.000	100%	16.717.360.000	100%	18.389.096.000	100%	85.432.110.088		Kab. Tanjab Barat
		'4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dilaksanakan	26 Cabang Lomba	0	7.996.638.340	26 Cabang Lomba	8.470.000.000	26 Cabang Lomba	9.317.000.000	26 Cabang Lomba	10.248.700.000	26 Cabang Lomba	11.273.570.000	26 Cabang Lomba	12.400.927.000	26 Cabang Lomba	59.706.835.340	Bagian KESRA	
				Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	26 Cabang Lomba	26 Cabang Lomba		26 Cabang Lomba		26 Cabang Lomba		26 Cabang Lomba		26 Cabang Lomba		26 Cabang Lomba		156 Cabang Lomba			
				Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan	9 Kali Peringatan Hari Besar	9 Kali Peringatan Hari Besar		6 Kali Peringatan Hari Besar		6 Kali Peringatan Hari Besar		6 Kali Peringatan Hari Besar		6 Kali Peringatan Hari Besar		6 Kali Peringatan Hari Besar		39 Kali Peringatan Hari Besar			
				Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan		3 Kali Pembinaan		3 Kali Pembinaan		3 Kali Pembinaan		3 Kali Pembinaan		3 Kali Pembinaan		18 Kali Pembinaan			
				Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ	5 Kali Tahapan	5 Kali Tahapan		5 Kali Tahapan		5 Kali Tahapan		5 Kali Tahapan		5 Kali Tahapan		5 Kali Tahapan		30 Kali Tahapan			
				Jumlah Peserta pelatihan takmir Masjid	0	0		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		250 Orang			
				Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Safari Subuh dan Jum'at	0	0		48 Fasilitasi		48 Fasilitasi		48 Fasilitasi		48 Fasilitasi		48 Fasilitasi		48 Fasilitasi			
		'4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana rumah ibadah yang ditindaklanjuti	-	-	724.273.300	18 Proposal	3.560.000.000	25 Proposal	3.916.000.000	25 Proposal	4.307.600.000	25 Proposal	4.738.360.000	25 Proposal	5.212.196.000	118 Proposal	22.458.429.300		
				Jumlah proposal permohonan hibah sarana/prasarana pendidikan keagamaan yang ditindak lanjuti	-	-		39 Proposal		10 Proposal		10 Proposal		10 Proposal		10 Proposal		79 Proposal			

				Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	2 Lembaga / Badan	2 Lembaga / Badan		2 Lembaga / Badan		2 Lembaga / Badan		2 Lembaga / Badan		2 Lembaga / Badan		2 Lembaga / Badan		12 Lembaga / Badan			
				Jumlah peserta pelatihan da'i desa/kelurahan		-		134 Da'i Desa/Kel		134 Da'i Desa/Kel		134 Da'i Desa/Kel		134 Da'i Desa/Kel		670 Da'i Desa/Kel					
				Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	134 Da'i Desa/Kel	134 Da'i Desa/Kel		134 Da'i Desa/Kel		134 Da'i Desa/Kel		134 Da'i Desa/Kel		804 Da'i Desa/Kel							
				Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan	200 Orang	200 Orang		200 Orang		200 Orang		200 Orang		1200 Orang							
				Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan	3545 Orang	3545 Orang		5045 Orang		5545 Orang		6000 Orang		6000 Orang		32135Orang					
				Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi	2 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		1'2 Kali							
				Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD	2 kali fasilitasi	2 kali fasilitasi		2 kali fasilitasi		2 kali fasilitasi		2 kali fasilitasi		2 kali fasilitasi		12 kali fasilitasi					
		'4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	2 Kali Rapat	2 Kali Rapat	31.142.48	2 Kali Rapat	530.000.000	2 Kali Rapat	583.000.000	2 Kali Rapat	641.300.000	2 Kali Rapat	705.430.000	2 Kali Rapat	775.973.000	12 Kali Rapat	3.266.845.448		
				Jumlah fasilitasi koordinasi terkait kerukunan umat beragama	-	-		2 Fasilitasi		2 Fasilitasi		2 Fasilitasi		10 Fasilitasi							
				Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	653 pasang	653 pasang		200 pasang		200 pasang		200 pasang		1653 pasang							
Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliya ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan	5 Kali			5 Kali	5 Kali	5 Kali		5 Kali		30 Kali											
2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/p	2.3. Meningkatkan a penataan produk hukum daerah	'4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	926.797.269	100%	1.406.000.000	100%	1.481.000.000	100%	1.556.000.000	100%	1.631.000.000	100%	1.706.000.000	100%	8.706.797.269	Bagian Hukum	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	10 Perda	12 Perda	488.814.271	12 Perda	526.000.000	12 Perda	551.000.000	13 Perda	576.000.000	14 Perda	601.000.000	15 Perda	626.000.000	76 Perda	3.368.814.271		
				Jumlah Perbup yang diundangkan	30 Perbup	50 Perbup		30 Perbup		40 Perbup		45 Perbup		50 Perbup		50 Perbup		265 Perbup			

Pengawasan kinerja pemda				Jumlah SK yang diterbitkan	1000 SK	1000 SK		1000 SK		1000 SK		1050 SK		1100 SK		1100 SK		6250 SK			
		'4.01.0 2.2.03. 02	Kegiatan Fasiltasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	3 Perkara	3 Perkara	162.838.000	2 Perkara	450.000.000	2 Perkara	475.000.000	2 Perkar a	500.000.000	2 Perkara	525.000.000	2 Perkar a	550.000.000	10 Perkara	2.662.838.000		
				Jumlah Laporan Aksi HAM	4 Lap.Aksi HAM	4 Lap.Ak si HAM		4 Lap.Ak si HAM		4 Lap.Ak si HAM											
				Jumlah Laporan Kadarkum	-	1 Lapora n Kadark um		1 Lapora n Kadark um		1 Lapora n Kada rkum		-		1 Lapora n Kada rkum		5 Lapora n Kada rkum					
		'4.01.0 2.2.03. 03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	-	4 Kali	275.144.998	4 Kali	430.000.000	4 Kali	455.000.000	4 Kali	480.000.000	4 Kali	505.000.000	4 Kali	530.000.000	20 Kali	2.675.144.998		
				Jumlah Laporan SJDIH	1 Laporan SJIDH	1 Lapora n SJIDH		1 Lapora n SJIDH		1 Lapora n SJID H		1 Lapora n SJIDH		5 Lapora n SJIDH							
	Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum			600 Buku Perda 12 Desa/Kel	600 Buku Perda 12 Desa/K el	1.500 Perda 6 Desa/K el		2.000 Perda 6 Desa/K el		2.500 Perda 6 Desa/ Kel		3.000 Perda 6 Desa/K el		12.700 Perda 42 Desa/K el							
	2.4. Meningkatnya kerjasama antar daera/lembaga/perorangan dalam negeri dan luar negeri	'4.01.0 2.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	100%	570.593.968	100%	811.761.765	100%	885.000.000	100%	945.000.000	100%	1.005.000.000	100%	1.065.000.000	100%	5.282.355.733	Bagian Kerjasama	Kab. Tanjab Barat
		4.01.02 .2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	67 Dok	67 Dok	317.892.065	107 Dok	347.892.065	147 Dok	380.000.000	187 Dok	400.000.000	227 Dok	420.000.000	267 Dok	440.000.000	1002 Dok	2.305.784.130		
		'4.01.0 2.2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	3 Dok	3 Dok	146.232.203	6 Dok	300.000.000	9 Dok	320.000.000	12 Dok	340.000.000	15 Dok	360.000.000	18 Dok	380.000.000	63 Dok	1.846.232.203		
		4.01.02 .2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	70 Dok	70 Dok	106.469.700	113 Dok	163.869.700	156 Dok	185.000.000	199 Dok	205.000.000	242 Dok	225.000.000	285 Dok	245.000.000	1065 Dok	1.130.339.400		
	2.5.Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	'4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	100%	8.810.849.686	100%	41.000.350.298	100%	43.110.870.000	100%	36.839.900.000	100%	22.656.390.288	100%	22.767.279.000	100%	175.185.639.272	Bagian Perekonomian	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	100%	100%	7.277.477.298	100%	39.000.000.000	100%	39.175.000.000	100%	34.400.000.000	100%	19.550.000.000	100%	19.700.000.000	100%	159.102.477.298		
		'4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tanggo Rajo, PT Tanjab Sakti, BPD)	3 BUMD	3 BUMD	7.138.436.500	3 BUMD	38.700.000.000	4 BUMD	38.725.000.000	4 BUMD	33.800.000.000	4 BUMD	18.850.000.000	4 BUMD	18.900.000.000	4 BUMD	156.113.436.500		

				Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi (PDAM Tirta Pengabuan)	-	1 BUMD		1 BUMD		1 BUMD		1 BUMD		1 BUMD		1 BUMD				
				Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)	1 Laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan		
				Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali		
		'4.01.0 3.2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 Kali		
				Jumlah dokumen laporan sembako	12 Dok	12 Dok	67.357.8 48	12 Dok	150.000.00 0	12 Dok	225.000. 000	12 Dok	300.00 0.000	12 Dok	350.00 0.000	12 Dok	400.000. 000	60 Dok	1.492.3 57.848	
				Jumlah dokumen laporan TPID	5 Dok	5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		25 Dok		
		'4.01.0 3.2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
				Jumlah laporan Pupuk	4 Laporan	4 laporan	71.682.9 50	4 laporan	150.000.00 0	4 Laporan	225.000. 000	4 Laporan	300.00 0.000	4 Laporan	350.00 0.000	4 Laporan	400.000. 000	4 Laporan	1.496.6 82.950	
				Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM	4 Kali	4 kali		4 kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
				Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran	4 Kali	4 kali		4 kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
2.Meningkat kan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,be rbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/p engawasan kinerja pmda	2.6.Meningk atnya akses informasi pembanguna n daerah	'4.01.0 3.2.02	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	305.663. 400	100%	575.000.00 0	100%	632.500. 000	100 %	695.75 0.000	100%	765.32 5.000	100 %	841.857. 500	100%	3.816.0 95.900	
		'4.01.0 3.2.02. 01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokum en		1 Doku men		1 Dokum en		
				Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat	12 bulan	12 bulan	124.350. 000	12 bulan	250.000.00 0	12 bulan	275.000. 000	12 bulan	302.50 0.000	12 bulan	332.75 0.000	12 bulan	366.025. 000	12 bulan	1.650.6 25.000	
		'4.01.0 3.2.02. 02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	4 kali	4 kali	36.313.4 00	4 kali	150.000.00 0	4 kali	165.000. 000	4 kali	181.50 0.000	4 kali	199.65 0.000	4 kali	219.615. 000	4 kali	952.07 8.400	
		'4.01.0 3.2.02. 03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	12 Laporan	12 Lapora n		12 Lapora n		12 Lapora n		12 Lapor an		12 Lapora n		12 Lapor an		12 Lapora n		
				Jumlah pelaporan laporan tepra sismonteptra	12 Laporan	12 Lapora n	145.000. 000	12 Lapora n	175.000.00 0	12 Lapora n	192.500. 000	12 Lapor an	211.75 0.000	12 Lapora n	232.92 5.000	12 Lapor an	256.217. 500	12 Lapora n	1.213.3 92.500	

2.7.Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif		'4.01.0 3.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100%	100%	788.950.288	100%	810.350.298	100%	2.626.870.000	100%	1.000.000.000	100%	1.522.500.288	100%	1.325.000.000	100%	8.073.670.874	Bagian PBJ	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.0 3.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	100%	150 Paket	191.450.000	150 Paket	202.450.000	150 Paket	1.675.070.000	165 Paket	500.000.000	150 Paket	525.000.000	155 Paket	625.000.000	770 Paket	3.718.970.000		
				Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas	100%	150 Paket		150 Paket		165 Paket		150 Paket		155 Paket		770 Paket					
		'4.01.0 3.2.03.02	'Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	44 OPD	44 OPD	345.700.000	44 OPD	363.400.000	44 OPD	600.000.000	44 OPD	300.000.000	44 OPD	545.700.000	44 OPD	400.000.000	44 OPD	2.554.800.000		
				Jumlah pemeliharaan Co. Location	1 Lokasi	1 Lokasi		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
				Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala	2 Server	2 Server		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
		'4.01.0 3.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	-	84 Peserta	251.800.288	50 Peserta	244.500.298	50 Peserta	351.800.000	50 Peserta	200.000.000	50 Peserta	451.800.288	50 Peserta	300.000.000	288 Peserta	1.799.900.874		
				Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar	-	84 Peserta		30 Peserta		30 Peserta		30 Peserta		30 Peserta		204 Peserta					
		'4.01.0 3.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	80%	438.758.700	80%	615.000.000	80%	676.500.000	80%	744.150.000	80%	818.565.000	80%	900.421.500	80%	4.193.395.200	Bgaian ASDA	Kab. Tanjab Barat
		'4.01.0 3.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Fasilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan,Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	99%	13 kali	85.739.600	13 kali	150.000.000	13 kali	346.500.000	13 kali	181.500.000	13 kali	419.265.000	13 kali	219.615.000	78 kali	1.402.619.600		
				Jumlah Dokumen Laporan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen					
		'4.01.0 3.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	100%	5 kali	285.416.600	5 kali	315.000.000	5 kali	165.000.000	5 kali	181.500.000	5 kali	199.650.000	5 kali	461.191.500	30 kali	1.607.758.100		
				Jumlah Laporan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen					
		'4.01.0 3.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	100%	5 kali	67.602.500	5 kali	150.000.000	5 kali	165.000.000	5 kali	381.150.000	5 kali	199.650.000	5 kali	219.615.000	30 kali	1.183.017.500		
				Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi		1 Dokum		1 Dokum		1 Dokum		1 Doku		1 Dokum		6 Dokum					

						en		en		en		men		en		men		en			
1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggung jawab	1.1.Meningkatnya kualitas perencanaan ,keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	'5.02.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota berjalan dengan baik	100%	100%	87.425.000	100%	94.600.000	100%	105.784.250	100%	116.362.675	100%	127.998.943	100%	140.798.837	100%	672.969.705	Bagian Renkeu	Kab. Tanjab Barat
		'5.02.01.2.03	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD terkelola dengan baik	100%	100%	87.425.000	100%	94.600.000	100%	105.784.250	100%	116.362.675	100%	127.998.943	100%	140.798.837	100%	672.969.705		
		'5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD OPD yang terkelola	1.137 BMD	1.137 BMD	87.425.000	1.147 BMD	94.600.000	1.157 BMD	105.784.250	1.177 BMD	116.362.675	1.197 BMD	127.998.943	1.207 BMD	140.798.837	1.207 BMD	672.969.705		
JUMLAH TOTAL:							62.766.863.606		107.743.488.822		118.027.824.514		117.966.512.522		110.515.665.103		118.565.667.638		635.586.022.205		

BAB. VII
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ tahunan dan LKPJ lima tahunan akhir akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun 5 (lima) tahun 2021-2026 dapat lihat pada Tabel XI dan Tabel **T.C. 28** dibawah.

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1.	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan yang diverifikasi dibagi Jumlah dokumen perencanaan pelaporan yang disampaikan dikali seratus persen	BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN	
		Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan masyarakat yang masuk dibagi jumlah pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan masyarakat yang diproses dikali seratus persen	BAGIAN UMUM	
		Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	jumlah kebutuhan sarana prasarana kantor setda KDH/WKDH dibagi jumlah sarana prasarana yang ada dikali seratus persen	BAGIAN UMUM	
	1.2. Menigkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Total nilai perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah	BAGIAN ORGANISASI	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai presepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang		
		Nilai AKIP Kabupaten	Hasil evaluasi Kemen PAN & RB		
	1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	Jumlah Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi Jumlah Produk hukum yang ada dikali seratus persen	BAGIAN PROTOKOLER	
2.	2.1. Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Persentase keterisian data IKK LPPD	Jumlah IKK LPPD yang harus isi oleh OPD dibagi Jumlah OPD yang mengisi IKK LPPD dikali seartus persen	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		Skor LPPD	Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri		
	2.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang ada dikali seratus persen	BAGIAN KESRA	
	2.3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Jumlah Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi Jumlah Produk hukum yang ada dikali seratus persen	BAGIAN HUKUM	
	2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	Jumlah kerjasama antar daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah kerjasama daerah lembaga yang diterbitkan diakli seartus persen	BAGIAN KERJASAMA	

	2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	Jumlah kebijakan bidang ekenomi yang dilaksnakan dibagi jumlah kebijakan ekonomi yang ada dikali seratus persen	BAGIAN PEREKONOMIAN	
	2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Jumlah evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah dibagi dan pengendalian program pembangunan daerah yang dilaksanakan dibagi seratus persen	BAGIAN ADP	
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	Jumlah paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah pengadaan barang & jasa ditayangkan dan dilaksanakan dgn tuntas dan tepat waktu dikali seratus persen	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
	2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif dibagi Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang ada dikali seratus persen	BAGIAN SDA	

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Jika dalam penyusunan Revisi Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19680817 199203 1 007